

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab v dapat disimpulkan bahwa peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (Bina Marga) Kabupaten Belu dalam mengawasi kualitas infrastruktur jalan di kota atambua belum terlaksana dengan baik, Adapun rincian kesimpulan sebagai berikut :

A.1. Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan anggaran yang dilihat dari aspek pengawasan kualitas infrastruktur jalan di Kota Atambua.

Dari aspek ini menunjuka bahwa perbaikan kualitas jalan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR masih belum terealisasi semuanya dengan baik di setiap jaringan jalan yang ada di Kota Atambua. Beberapa faktor yang menjadi hambatan seperti pembebasan lahan milik masyarakat yang terkena dampak pelebaran jalan, dan kurangnya pendanaan yang baik. Adapun Perbaikan yang dilakukan namun masih sebatas menambal dan pemberial material asbuton untuk penaganan sementara. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa sebagai akibat baru ditambahkan beberapa paket pekerjaan pada anggaran perubahan tahun anggaran 2019 serta terbatasnya dana yang disediakan akibatnya pekerjaan yang tertunda. Hal lain yang menghambat jalannya pekerjaan jalan yakni keadaan cuaca yang tidak menentu, Selain itu juga kurangnya pendanaan yang disediakan. Target yang telah direncanakan dalam merehabilitas jalan sepanjang 5000 meter, Namun belum terealisasikan semua.

A.2. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang yaitu berkurangnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terlihat dari Aspek Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Atambua.

Dari aspek ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dijalankan dengan baik. Setiap tugas yang diberikan dijalankan dan diawasi secara bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Laporan berkaitan dengan semua kasus atau persoalan tuntutan masyarakat ditanggapi dengan baik mulai dari pimpinan/kadis sampai dengan staf atau pelaksana. Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang harus ditambah jumlahnya, Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur dan dievaluasi dan diidentifikasi sedemikian rupa sehingga menemukan kebijakan yang tepat dalam penanganannya.

A.3. Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan fungsional dan laporan pengawasan lainnya yang terlihat dari Aspek Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Atambua.

Dari aspek ini menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas kasus yang terjadi terbilang cukup kompleks. Kurangnya koordinasi antara berbagai elemen menjadi pemicu terjadinya masalah. Terlepas dari hal tersebut pengawasan yang kurang baik juga menimbulkan pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan. Setiap jalan hendaknya memiliki system Drainase yang baik sehingga system pengairannya dapat berjalan sesuai drainase yang telah dibuat tanpa mengalir di jalan sehingga merusak jalan yang telah dibuat. Drainase yang baik dapat menambah kualitas jalan agar tidak mudah rusak sebelum masanya. Setiap kasus pengawasan dilaporkan secara fungsional dan dilakukan peninjauan terlebih dahulu. Sehingga dalam mengambil keputusan sesuai dan tepat pada sasaran. Namun sebagian masyarakat lebih menyerahkan pada pihak yang berwenang. Laporan pengawasan fungsional baik petugas

lapangan maupun yang dilakukan masyarakat itu sendiri diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi pembangunan infrastruktur yang berkualitas.

A.4. Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang dilihat dari Aspek Pengawasan Infrastruktur Jalan di Kota Atambua.

Dari aspek ini menunjukkan bahwa berkurangnya tingkat kesalahan baik kebocoran, pemborosan serta pungutan liar terbilang cukup baik. Koordinasi antar berbagai pihak turut mendukung serta mengurangi tingkat kesalahan. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan-pelatihan memberikan efek positif agar terhindar dari perilaku penyimpangan. Terlepas dari hal tersebut faktor alam juga menjadi salah satu pertimbangan yang juga harus diperhatikan agar terhindar dari kesalah-kesalah yang akan terjadi.

B. SARAN

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Belu maka perlu mengambil langkah - langkah kedepan sebagai berikut :

B.1. Meningkatkan kinerja pada setiap bidang yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu, dengan penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya;

B.2. Mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu dengan pelaksanaan koordinasi dengan berbagai stakeholder;

B.3. Kegagalan capaian kinerja banyak dipengaruhi oleh kondisi uncountables, seperti penganggaran pada perubahan dengan waktu yang singkat, untuk itu kedepannya kegiatan-kegiatan yang memerlukan waktu panjang dianggarkan lebih cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachman, Arifin, 2001, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan*, Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Agus Dwiyanto. 2006. *Mewujudkan Good Governace Melayani Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Anwar, 2005, *Evaluasi Kinerja*. Bandung: Refika Aditama.
- Arikunto. 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Brantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Dharma S. S, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Djambatan.
- Eny Kusdarini. 2011. *Dasar – Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Faisal, 2010, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Grigg, N, 1988, *Infrastructure Engineering and Management*.
- H.A.S Moenir. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Horton dan Hunt, 2007, *Sosiologi Jilid I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu 2019*
- Litjan Poltak Sinambela, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marwan Ja'far. 2007, *Infrastruktur Pro Rakyat, Strategi Investasi Infrastruktur Indonesia Abad 21*. Pustaka Toko Bangsa.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Saefullah. 1999. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal*

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sumedang: FISIP UNPAD.

Silalahi, Ulbert, 2009, *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Alegensindo.

Siagian, Sondang. P, 2005, *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Stone, 1974, *American Public works Association*.

Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. 2003, *METODE Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*.

Umi Narimawati, 2008, *Motodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2006, Jakarta: Balai Pustak.

SUMBER LAIN

➤ PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 *tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur*.

Peraturan Daerah. Kabupaten Belu. No. 4. Tahun 2010 *tentang Pembentukan Sususnan Organisasi dan tata Kerja*.

➤ SUMBER INTERNET

ferdinandus asy. Artikel. *Terkendala Dana, Jalan Kota Atambua Berlubang* (2 September 10:23 2018)

<http://kupang.tribunnews.com/2013/03/18/jalan-di-atambua-lubang-di-mana-mana>. (diunduh tanggal 07 januari 2019) pukul 20:27 WIB.

<http://kupang.tribunnews.com/2018/07/13/26-warga-belu-malaka-meninggal-akibat-kecelakaan>. (diunduh tanggal 04 maret 2019) pukul 14:36 WIB.

<https://materibelajar.co.id/pengertian-infrastruktur/> diakses pada tanggal 16 agustus 2019

<https://www.pu.go.id/organisasi/ditjen-bina-marga> yang diakses pada tanggal 02 agustus 2019

<https://www.pu.go.id/organisasi/kedudukan> tugas dan fungsi PUPR. diakses pada tanggal 02 agustus 2019

<https://mentribelajar.co.id/pengertian> infrastruktur. diakses pada tanggal 02 agustus 2019

<https://rizkypasoa.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-fungsi-pengawasan.html>

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kota Atambua 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Belu 2019

➤ **JURNAL-JURNAL**

Dilla Sevtiana, 2015, *Upaya Pemeliharaan Jalan Kabupaten Melalui Unit Reaksi Cepat Bina Marga (URC BIMA) Dalam Mewujudkan Responsivitas Pemerintah Daerah Di Kabupaten Gresik*. diakses pada tanggal 7 juni 2019

Giovani, Devta, 2017, *Evaluasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jala..* diakses pada tanggal 7 juni 2019.

Ulvi Fandri, 2006, *Pengawasan Pemeliharaan Jalan Oleh Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Tanjungpinang* .diakses pada tanggal 7 juni 2019.